



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR : 56/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013
TENTANG**

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK ,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit; b. bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan Kantor Akuntan Publik yang telah memenuhi persyaratan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 209);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435.698/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435698/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
 3. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Pontianak tanggal 21 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
- KEDUA : Menunjuk Nama-nama Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Kantor Akuntan Publik sebagaimana diktum KEDUA:
1. Melakukan audit terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) dari masing-masing pasangan calon, sesuai prosedur yang disepakati.
 2. Audit terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) wajib diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Kabupaten Pontianak;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Pontianak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 900/0488/DPPKAD-A tentang Pemberian Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 21 Agustus 2013
KETUA

ttd,

MUNIR PUTRA, ST, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK

KASUBBAG KUKUM



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PONTIANAK
 NOMOR : 56/Kpts/KPU-Kab.019.435698/2013
 TANGGAL : 21 Agustus 2013

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
 DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK
 TAHUN 2013**

NO.	Kantor Akuntan Publik	Alamat	LPPDK Pasangan Calon
1.	Sardjono Budi Sudharnoto	Komplek Purnama Permai No. 1 Pontianak	Sunandar, SE Martinus, SE, M.Si dan Drs. H. Ria Norsan, MH Gusti Ramlana, S.Sos
2.	Tarmizi Achmad	Jln. Dewi Sartika Raya No. 7 Perum UNDIP Sukerejo Semarang	Sabli Awaludin, SE Mui Huat dan Dr. H. Mochtaria M. Noh, M.Si Edy Gunawan
3.	Syarbini Ikhwan	Jln. Karya Baru II No. 68 Pontianak	Drs. H. Agus Salim, MM H. Moh. Ghozali dan Drs. H. Rubijanto Mohamad Shaleh, S.Sos

Ditetapkan di Mempawah
 pada tanggal 21 Agustus 2013

KETUA

ttd,

MUNIR PUTRA, ST, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK

KASUBDAG HUKUM

